

FAKTOR - FAKTOR YANG MENENTUKAN BESARAN *SHADOW ECONOMY* PADA BRICS COUNTRIES DAN INDONESIA

Acwin Hendra Saputra¹⁾, Rahadi Nugroho²⁾

¹⁾Politeknik Keuangan Negara STAN

e-mail: acwin.hs@gmail.com

²⁾Sekretariat BPPK

e-mail: rnugroho83@gmail.com

ABSTRACT

Shadow economy is a fact faced by all countries in the world. Despite the existence of the shadow economy which can not be disputed, the accurate information regarding the existence of shadow economy is very difficult to be obtained because all parties involved in it do not want to be identified (hidden nature). The aims of this study is to analyze the determinants that have significant influence on the shadow economy for BRICS Countries and Indonesia. Using panel data for 6 countries we find that the performance of government, intensity of regulatory on economic framework, tax burden significantly affect shadow economy. EGLS panel data analysis results reveal the key determinants of shadow economy estimates. Then, those determinants are used to compare the shadow economy among examined countries to obtain estimates of each country's performance. In this research, Indonesia has relatively good performance compared with BRICS Countries regarding shadow economy determinants.

ABSTRAK

Shadow economy adalah fakta yang dihadapi oleh semua negara di dunia. Meskipun keberadaan ekonomi bayangan tidak dapat dibantah, informasi yang akurat mengenai keberadaan *shadow economy* sangat sulit diperoleh karena semua pihak yang terlibat di dalamnya tidak ingin diidentifikasi (bersifat tersembunyi). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor penentu yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *shadow economy* untuk negara BRICS dan Indonesia. Menggunakan data panel enam negara, kami menemukan bahwa kinerja pemerintah, intensitas regulasi pada kerangka ekonomi, beban pajak secara signifikan mempengaruhi *shadow economy*. Hasil analisis data panel EGLS mengungkapkan kunci penentu besaran *shadow economy*. Kemudian, faktor penentu tersebut digunakan untuk membandingkan *shadow economy* di antara negara-negara yang diteliti untuk mendapatkan besaran kinerja masing-masing negara. Dalam penelitian ini, Indonesia memiliki kinerja yang relatif baik dibandingkan dengan Negara BRICS mengenai faktor penentu *shadow economy*.

Kata kunci: *shadow economy*, kinerja pemerintah, intensitas regulasi, beban pajak, panel EGLS, Negara BRICS.

1. PENDAHULUAN

Shadow economy atau sering disebut sebagai *underground economy* memiliki eksistensi yang sama tuanya dengan sektor ekonomi formal. Aktivitas yang berkaitan dengan *underground economy* atau yang oleh Mehnaz Ahmed dan Qazi Masood Ahmed (1995) disebut juga sebagai: *hidden, unreported, informal, gray, shadow, illegal, unofficial, unobserved, unrecorded, parallel, black, cash, invisible, irregular, marginal, and second economies* adalah sebuah fakta yang dihadapi oleh semua negara di dunia. Meskipun keberadaan *shadow economy* tidak dapat dibantah, namun informasi yang akurat terkait keberadaan dan besaran *shadow economy* pada pasar barang dan tenaga kerja menjadi sangat sulit untuk didapatkan karena semua pihak yang terlibat di dalamnya memang tidak ingin teridentifikasi.

Mankiw (2007), mendefinisikan PDB sebagai nilai pasar dari semua barang jadi dan jasa yang diproduksi di suatu negara selama kurun waktu tertentu. Produk Domestik Bruto (PDB) sampai saat ini masih dianggap sebagai metode pengukuran terbaik dari kinerja perekonomian suatu negara. Karena sifat dari *shadow economy* yang tidak ingin teridentifikasi dan termasuk pendapatan yang tidak dilaporkan atau tidak tercatat ke dalam PDB, maka sebagai pendahuluan kita harus mengetahui konsep perhitungan PDB itu sendiri. Beberapa komponen yang membentuk PDB dapat dilihat dalam persamaan identitas di bawah ini:

$$Y = C + I + G + NX$$

PDB (Y) adalah penjumlahan dari empat komponen: konsumsi (C), investasi (I), pembelian pemerintah (G), dan ekspor netto (NX). Persamaan ini disebut identitas pos pendapatan nasional (*national income accounts identity*). PDB diupayakan komprehensif. PDB mencakup semua hal yang diproduksi oleh perekonomian dan dijual secara legal di pasar. Terdapat pula

beberapa jenis produk yang nilai ekonomisnya tidak dapat disertakan dalam perhitungan PDB karena perhitungannya memang sangat sulit dilakukan, misalnya nilai ekonomis suatu produk yang diperdagangkan di pasar gelap (ilegal) atau diperdagangkan secara diam-diam dengan maksud menghindari pencatatan oleh pemerintah. Adanya kesulitan dalam mengumpulkan data serta tidak masuknya aktivitas *shadow economy* membuat hasil perhitungan PDB terkadang menjadi lebih rendah (*underestimate*) daripada nilai sebenarnya.

Selain tidak tercatat dalam perhitungan PDB, kegiatan *shadow economy* dapat merugikan negara dilihat dari sisi potensi penerimaan pajak yang hilang atau penghindaran pajak. Sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan *shadow economy* tidak hanya akan mempengaruhi perekonomian suatu negara dari sisi PDB, melainkan juga akan meningkatkan defisit anggaran negara yang berimbas pada kenaikan tarif pajak untuk mengimbangi kenaikan defisit yang terjadi. Dampaknya perekonomian akan mengarah pada *bad equilibrium* yang mengarah pada pengambilan kebijakan publik yang tidak tepat sasaran serta tidak efektif karena tidak tersedianya akses informasi yang terukur akan keberadaan *shadow economy*.

Terdapat banyak penelitian empirik mengenai penyebab, efek dan determinan dari *shadow economy*. Mayoritas dari penelitian tersebut pada dasarnya mempertimbangkan variabel-variabel seperti *income per capita, unemployment, tax burden, government spending, regulatory cost, openness to international trade* dan juga beberapa karakteristik institusional dan kultural seperti disebutkan dalam penelitian (Johnson, dkk. 1997, 1998; Friedman, dkk. 2000; Torgler dan Schneider, 2007; Elgin, 2010). Terdapat pula penelitian yang secara khusus berfokus pada pembahasan efek dari *shadow economy* pada kualitas pengambilan

kebijakan di bidang fiskal (Cicek dan Elgin, 2011); efek *shadow economy* pada kebijakan penetapan jaring pengaman sosial serta perilaku dari partisipasi angkatan kerja (Schneider dan Enste, 2000); efek *shadow economy* pada distribusi pendapatan (Hatipoglu dan Ozbek, 2011); efek *shadow economy* pada efek pada besarnya siklus bisnis (Elgin, 2012); efek *shadow economy* pada basis moneter (Tanzi, 1983); D'Erasmus dan Moscoso Boedo (2012) yang meneliti efek *shadow economy* pada besaran *total factor productivity* (TFP); dan juga beberapa penelitian mengenai determinan *shadow economy* yang dilakukan oleh De Soto (1989), Dreher dan Schneider (2006) serta Singh, dkk. (2012). Ada pun literatur mengenai *shadow economy* di Indonesia dapat ditelusuri pertama kali dalam penelitian oleh Sritua Arief (1993), Chatib Basri (2003), yang menyatakan estimasi besaran *shadow economy* di Indonesia adalah 40 persen dari PDB atau estimasi sebesar 30 sampai dengan 40 persen PDB yang disampaikan oleh Faisal Basri (2003).

Adapun Schneider (2011) melakukan penelitian lebih mendalam pada negara China, India dan Indonesia terkait posisi tiga negara tersebut sebagai tiga negara terbesar dalam populasi angkatan kerja di Asia. Menurut estimasi Schneider (2011) di China 160 juta orang berkerja pada *shadow economy* atau 21,9% dari angkatan kerjanya, di India 217 juta orang atau diperkirakan 50% dari angkatan kerjanya bekerja pada *shadow economy* sektor non formal sedangkan di Indonesia 36,7 juta angkatan kerjanya turut serta dalam aktivitas *shadow economy* atau setara dengan 37,4% dari angkatan kerja formalnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Mempertimbangkan penelitian dari Schneider (2011), penelitian ini akan mengidentifikasi determinan atau faktor-faktor kunci dari *shadow economy* menggunakan data panel untuk 6 negara, yaitu anggota BRICS *Countries* dan Indonesia. Brics adalah akronim dari Brasil, Russia, India, China dan South Africa yang merupakan lima negara dengan pertumbuhan

Tabel 1. *Shadow Economy dan Shadow Economy Labor Force*

Country	Informal employment (1998)			Population (1998) millions	Labor force (1998)		Informal GNP In billion \$, 1998	Official GNP in billion \$, 1998	Informal GNP as % of official GNP
	As % Millions	As % of labor force	As % of population		As % of Millions	As % of population			
China	162.40	21.9	13.1	1,238.60	743.0	59.99	138,327	1,055,000	13.1
India	217.20	50.4	22.2	979.70	431.0	43.99	95,568	427,400	22.4
Indonesia	36.70	37.4	18.0	203.70	98.0	48.11	24,956	221,500	11.3
Mongolia	0.42	44.0	16.2	2.60	1.0	38.46	169	1,000	16.9
Nepal	8.60	78.1	37.6	22.90	11.0	48.03	1,803	4,800	37.6
Pakistan	29.40	60.0	22.3	131.60	49.0	37.23	-	-	-
Phillippines	9.80	30.6	13.0	75.20	32.0	42.55	11,520	88,400	13.1
Sri Lanka	2.50	31.3	13.3	18.80	8.0	42.55	-	-	-
Yemen	3.30	65.0	19.9	16.60	5.0	30.12	990	4,400	22.5
Average of 9 countries	52.3	46.5	19.5			43.4			19.5

Sumber: Worldbank <http://www.worldbank.org/html/extdr/regions.htm>

ekonomi yang pesat. Penggunaan istilah BRICS pertama kali dilontarkan oleh Goldman Sachs (2001). Kecuali Russia anggota BRICS adalah negara berkembang atau negara industri baru yang terkenal dengan angka pertumbuhan ekonominya yang cepat serta memiliki pengaruh ekonomi yang signifikan pada tataran regional dan internasional. Pada tahun 2013, dari lima anggota BRICS telah mewakili sekitar tiga milyar penduduk dan dengan angka nominal GDP sebesar 14,9 trilyun dolar Amerika. BRICS *Countries* dan Indonesia dipilih dengan pertimbangan angka pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut merupakan yang paling cepat pertumbuhannya untuk saat ini atau sering disebut sebagai *new emerging countries*.

Penelitian mengenai determinan *shadow economy* dengan model analisis panel EGLS sebelumnya telah dilakukan oleh Manolas, dkk. (2013) untuk obyek negara Yunani dengan penambahan variabel tambahan *produk market regulation* yang mana tidak digunakan dalam penelitian ini dikarenakan keterbatasan data. Ada pun variabel *bureaucracy costs, extra payments/bribes/favoritism, business regulations* akan digunakan dalam penelitian ini dengan pertimbangan variabel-variabel tersebut masih menjadi isu dominan untuk negara-negara berkembang di mana BRICS *countries* dan Indonesia sebagai obyek penelitian ini mayoritas adalah negara-negara berkembang.

Perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) tidak mencakup adanya aktivitas *shadow economy*. Tidak tercakupnya *shadow economy* dalam perhitungan PDB karena susahya menghitung besaran *shadow economy* yang memiliki karakteristik *hidden nature* serta belum diketahuinya determinan atau faktor kunci yang mempengaruhi terjadinya *shadow economy*.

Dengan mengetahui determinan dari *shadow economy* pemerintah sebagai pembuat regulasi dalam perekonomian dapat mengambil formulasi kebijakan perekonomian yang tepat terkait *shadow economy*.

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka penulis ingin mencapai tujuan penulisan ini yaitu untuk melakukan analisis terhadap determinan *shadow economy* pada BRICS countries dan Indonesia. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai perangsang penelitian lain terkait determinan atau pun keberadaan dan besaran *shadow economy* dan dapat menjadi bahan masukan bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah kebijakan atau regulasi yang akan dibuat terkait permasalahan *shadow economy*. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan untuk melakukan estimasi potensi pengurangan besaran *shadow economy* dengan dengan memperbaiki regulasi terkait determinannya. Selain itu penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi tambahan *shadow economy* di Indonesia.

Menganalisis determinan atau faktor kunci dari *shadow economy* merupakan salah satu tantangan untuk dapat mengurangi dampak dan mencegah terjadinya aktivitas tersebut. Dengan mengetahui determinan *shadow economy* maka besaran dan pertumbuhannya dapat dicegah dengan pengambilan kebijakan terkait determinannya. Penelitian mengenai determinan *shadow economy* hendaknya dilakukan dengan metode ilmiah dan didukung oleh data yang andal dan dapat diperbandingkan. Dengan latar belakang hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis pengaruh performa pemerintahan terhadap besaran *shadow economy*;
- b. Menganalisis pengaruh intensitas regulasi terhadap besaran *shadow economy*;
- c. Menganalisis pengaruh besaran beban pajak terhadap besaran *shadow economy*.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah estimasi besaran *shadow economy* dari Ceyhun dan Oguz (2012) untuk BRICS countries dan Indonesia. Estimasi *shadow economy* akan menjadi dependen variabel dari penelitian ini. Sedangkan beberapa faktor yang disinyalir dapat menjadi determinan (independen variabel) dari *shadow economy* akan dianalisis hubungannya terhadap dependen variabelnya.

2.2. Data dan Variabel

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini beberapa merupakan hasil penelitian dari lembaga internasional atau pun pihak lain. Semua data terpublikasi secara online dan disediakan oleh organisasi internasional. Keseluruhan variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dependen variabel dan independen variabel. Dependen variabel terdiri dari Estimasi *Shadow Economy* (SE) yang merupakan hasil pengukuran besaran *shadow economy* dalam suatu negara sebagai prosentasi dari total GDP. Data tersebut diperoleh dari hasil penelitian Ceyhun dan Oguz (2012). Adapun independen variabel terdiri dari beberapa kategori berikut:

1. *The Worldwide Governance Indicators (WGI)*, dengan independen variabel berupa:
 - a. *Control of Corruption (COC)* adalah agregasi berbagai indikator yang mengukur persepsi sejauh mana kekuasaan publik diselewengkan untuk kepentingan pribadi, baik dalam skala korupsi kecil mau pun besar.
 - b. *Government Effectiveness (GE)* mencerminkan persepsi kualitas pelayanan publik, kualitas pelayanan sipil dan tingkat independensinya dari tekanan politik, kualitas

formulasi dan implementasi kebijakan, dan kredibilitas komitmen pemerintah terhadap kebijakan tersebut.

- c. *Voice and Accountability* mencerminkan persepsi sejauh mana warga suatu negara dapat berpartisipasi dalam memilih/menentukan pemerintahan mereka, serta kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, dan kebebasan media.
- d. *Political Stability and Absence of Violence* mencerminkan persepsi atas kemungkinan bahwa pemerintah akan stabil atau digulingkan dengan cara yang inkonstitusional atau kekerasan (kudeta), termasuk kekerasan bermotivasi politik dan terorisme.
- e. *Regulatory Quality* mencerminkan persepsi atas kemampuan pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan peraturan yang memungkinkan dan mempromosikan pengembangan sektor swasta.
- f. *Rule of Law* mencerminkan persepsi sejauh mana pemerintah memenuhi ekspektasi masyarakat atas kualitas penegakan hukum, hak milik, polisi, dan pengadilan, serta kemungkinan kejahatan dan kekerasan.

2. *Tax Revenue (% of GDP)*.

Tax Revenue (TR) mengacu pada transfer wajib kepada pemerintah pusat untuk kepentingan publik. Transfer wajib tertentu seperti denda, penalti, dan iuran jaminan sosial yang dikecualikan. (World Bank).

3. *Economic Freedom of the World (EFW)*, dengan independen variabel berupa:
 - a. *Credit market regulation (CMR)* mengukur pengaruh dari suatu kebijakan pada pasar untuk penawaran utang seperti yang terlihat oleh investor dari obligasi, wesel dan kewajiban sekuritas seperti *collateralized debt obligations (CDOs)*.
 - b. *Labor market regulations (LMR)* mengukur pengaruh dari suatu kebijakan seperti upah minimum dan sejenisnya.

- c. *Bureaucracy costs* (BC) mengukur biaya tambahan yang harus dikeluarkan saat melakukan proses perijinan pada instansi pemerintah untuk pendirian suatu usaha.
- d. *Extra payments/bribes/favoritism* mengukur persepsi mudahnya aparat dan instansi pemerintah untuk disuap atau menerima tambahan pendapatan ilegal untuk tujuan kemudahan bisnis.
- e. *Business regulations* (BR) mengukur jangkauan kebijakan yang tidak produktif dalam melakukan bisnis. (Laporan Tahunan Fraser Institute).

3. PEMBAHASAN

3.1. Pengaruh *Individual Government Indicator* pada *Shadow Economy*

Pada Tabel 2 diestimasi determinan besaran *shadow economy* dengan independen variabel, yaitu *control of corruption* (COC), *government effectiveness* (GE), *credit market regulation* (CMR), *labor market regulation* (LMR), *bureaucracy costs* (BC), *extra payments/bribes/favoritism* (EP), *business regulations* (BR), dan *tax revenue* (TR). Secara umum kesesuaian model ini adalah bagus, hal ini terlihat dengan nilai R^2 0.824947 di mana independen variabelnya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dependen variabelnya.

Untuk pengujian t-test *government effectiveness*, *bureaucracy costs*, *business regulations*, dan *tax revenue* memiliki pengaruh pada besaran *shadow economy* pada BRICS countries dan Indonesia untuk signifikasi statistik 1%, 5% dan 10%. Sedangkan *labor market regulation* memiliki pengaruh pada besaran *shadow economy* untuk signifikasi statistik 5% dan *credit market regulation* untuk signifikasi statistik 10%. Untuk hasil terinci adalah sebagai berikut:

(I) secara umum model pengujian dengan independen variabel *individual worldwide governance indicators* (AGI), yaitu: *control*

of corruption (COC), *government effectiveness* (GE) adalah memiliki pengaruh positif terhadap dependen variabelnya (*shadow economy*);

(ii) *government effectiveness* (GE) sebagai independen variabel memiliki pengaruh pada dependen variabel *shadow economy* pada signifikasi statistik 1%, 5% dan 10%; untuk *control of corruption* (COC) sebagai independen variabel tidak memiliki pengaruh pada dependen variabel *shadow economy* pada signifikasi statistik 1%, 5% dan 10% hal ini menarik karena penelitian sejenis dengan fokus obyek negara Yunani dan 21 Negara OECD (Manloas, dkk, 2013) mendapatkan hasil *control of corruption* memiliki pengaruh pada besaran *shadow economy*

Tabel 2. Determinan besaran *shadow economy* dengan *individual government indicator*

Dependent Variable: Shadow Economy
Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
Date: 04/16/13 Time: 19:03
Sample: 2002 2008
Periods included: 7
Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 42
Linear estimation after one-step weighting matrix
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)
WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank

Variable	Coefficient t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	14.62970	4.862743	3.008528	0.0050
COC	6.937142	4.933850	1.406030	0.1691
GE	-24.33111	5.317842	-4.575373	0.0001
CMR	-2.199300	1.415613	-1.553603	0.1298
LMR	1.454709	0.554846	2.621824	0.0131
BC	2.993747	0.383760	7.801084	0.0000
EP	0.995923	0.609022	1.635282	0.1115
BR	-4.480677	0.748871	-5.983244	0.0000
TR	1.653484	0.316632	5.222094	0.0000
Weighted Statistics				
R-squared	0.824947	Mean dependent var	32.71971	
Adjusted R-squared	0.782510	S.D. dependent var	14.98890	
S.E. of regression	5.023162	Sum squared resid	832.6613	
F-statistic	19.43935	Durbin-Watson stat	0.954833	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.694748	Mean dependent var	25.81476	
Sum squared resid	1229.339	Durbin-Watson stat	0.497948	

3.2. Pengaruh *Average Government Indicator* pada *Shadow Economy*

Pada Tabel 3 untuk estimasi determinan besaran *shadow economy* ditambahkan independen variabel, yaitu *average government indicator* (AGI) untuk mengetahui pengaruh performa pemerintah terhadap besaran *shadow economy*. Secara umum kesesuaian model ini adalah bagus, hal ini terlihat dengan nilai R^2 0.945222 di mana independen variabelnya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dependen variabelnya. Hal ini dapat diartikan performa pemerintah pada BRICS *countries* dan Indonesia memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap besaran *shadow economy*.

Untuk pengujian t-test *average government indicator*, *labor market regulation* dan *tax revenue* memiliki pengaruh pada besaran *shadow economy* pada BRICS *countries* dan Indonesia untuk signifikasi statistik 1%, 5% dan 10%. Sedangkan untuk signifikasi statistik 5% *credit market regulation* memiliki pengaruh *shadow economy* dan untuk signifikasi statistik 10% *labor market regulation* memiliki pengaruh pada besaran *shadow economy* untuk signifikasi statistik 5%.

Tabel 3. Determinan besaran *shadow economy* dengan *average government indicator*

Dependent Variable: Shadow Economy Method: Panel EGLS (Cross-section weights) Date: 04/16/13 Time: 19:14 Sample: 2002 2008 Periods included: 7 Cross-sections included: 6 Total panel (balanced) observations: 42 Linear estimation after one-step weighting matrix White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.200053	1.876108	-1.172669	0.2491
AGI	4.877035	0.406170	12.00739	0.0000
CMR	-0.613463	0.247454	-2.479102	0.0183
LMR	0.366008	0.127807	2.863767	0.0071
BC	0.072307	0.100461	0.719749	0.4766
EP	-0.014508	0.148055	-0.097989	0.9225
BR	-0.088588	0.139500	-0.635041	0.5297
TR	0.213036	0.042864	4.970054	0.0000
Weighted Statistics				
R-squared	0.945222	Mean dependent var	-1.169736	
Adjusted R-squared	0.933944	S.D. dependent var	3.491516	
S.E. of regression	0.945041	Sum squared resid	30.36549	
F-statistic	83.81249	Durbin-Watson stat	0.816792	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.860826	Mean dependent var	-1.839048	
Sum squared resid	33.98744	Durbin-Watson stat	0.760748	

Tabel 4. Determinan besaran *shadow economy* dengan *average government regulation*

Dependent Variable: Shadow Economy Method: Panel EGLS (Cross-section weights) Date: 04/16/13 Time: 19:25 Sample: 2002 2008 Periods included: 7 Cross-sections included: 6 Total panel (balanced) observations: 42 Linear estimation after one-step weighting matrix White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	25.16682	2.238676	11.24183	0.0000
AGR	-1.085641	0.582711	-1.863085	0.0704
COC	19.67337	4.182295	4.703964	0.0000
GE	-36.44196	4.386299	-8.308133	0.0000
TR	0.909883	0.086551	10.51266	0.0000
Weighted Statistics				
R-squared	0.770689	Mean dependent var	34.19343	
Adjusted R-squared	0.745899	S.D. dependent var	16.38778	
S.E. of regression	6.454534	Sum squared resid	1541.457	
F-statistic	31.08822	Durbin-Watson stat	0.716834	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.583790	Mean dependent var	25.81476	
Sum squared resid	1676.199	Durbin-Watson stat	0.266421	

3.3. Pengaruh *Average Regulation Indicator* pada *Shadow Economy*

Pada Tabel 4 untuk estimasikan determinan besaran *shadow economy* ditambahkan independen variabel, yaitu *average government regulation* (AGR) untuk mengetahui pengaruh performa pemerintah terhadap besaran *shadow economy*. Secara umum kesesuaian model ini adalah relatif bagus, hal ini terlihat dengan nilai R^2 0.770689 di mana independen variabelnya memiliki pengaruh terhadap dependen variabelnya. Hal ini dapat diartikan performa pemerintah pada BRICS countries dan Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap besaran *shadow economy*.

Untuk pengujian t-test *control of corruption*, *government effectiveness* dan *tax revenue* memiliki pengaruh pada besaran *shadow economy* pada BRICS countries dan Indonesia untuk signifikansi statistik 1%, 5% dan 10%. Sedangkan *average government regulation* memiliki pengaruh pada besaran *shadow economy* untuk signifikansi statistik 10%

3.4. Performa Indonesia terhadap BRICS Countries

Berdasarkan hasil pengolahan data panel EGLS, maka dapat diketahui determinan apa saja yang memiliki pengaruh signifikan terhadap *shadow economy* pada Brics countries dan Indonesia. Determinan-determinan yang memiliki pengaruh signifikan pada *shadow economy* kemudian dapat disimpulkan sebagai faktor-faktor potensial yang dapat digunakan untuk mengurangi besaran *shadow economy* pada Brics countries dan Indonesia. Dalam penelitian ini performa variabel yang mempengaruhi secara signifikan terhadap *shadow economy* untuk Indonesia dibandingkan dengan performa rata-rata dan performa terbaik Brics countries untuk kemudian dapat diketahui variabel mana saja yang harus mendapatkan perhatian lebih untuk mengurangi besaran *shadow economy* di Indonesia.

Tabel 5 . Performa Determinan *Shadow Economy* Indonesia terhadap Brics Countries

Variabel	Rata - rata Brics countries dan Indonesia	Negara dengan performa terbaik	Performa Indonesia
<i>Control of Corruption</i>	-0.39	0.37	-0.83
<i>Government Effectiveness</i>	-0.03	0.60	-0.36
<i>Credit Market Regulation</i>	7.39	9.76	7.41
<i>Labor Market Regulation</i>	5.52	7.13	4.97
<i>Bureaucracy Costs</i>	4.51	4.97	4.91
<i>Extra Payments/Bribes/Favoritism</i>	5.40	6.85	4.20
<i>Business Regulations</i>	5.01	6.27	5.19
<i>Tax Revenue</i>	14.92	26.53	12.39

Tabel 5 membandingkan performa Indonesia terhadap Brics Countries dengan fakta sebagai berikut:

- (I) didapati dalam keseluruhan determinan *shadow economy* yang ada Indonesia tidak pernah menduduki posisi sebagai *best performing country*, hal ini berarti menjadi peluang bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan perbaikan pada semua determinan *shadow economy*.
- (ii) untuk *credit market regulation*, *bureaucracy costs* dan *business regulations* Indonesia memiliki performa di atas rata-rata negara Brics Countries. Kondisi ini harus dipertahankan dan ditingkatkan untuk tetap menahan dan atau mengurangi pertumbuhan besaran *shadow economy* di Indonesia.
- (iii) ada pun untuk *control of corruption*, *government effectiveness*, *labor market regulation*, *extra payments/bribes/favoritism*, dan *tax revenue (% of GDP)* performa Indonesia masih berada di bawah rata-rata Brics Countries. Hal ini sejalan dengan kondisi Indonesia sebagai negara berkembang yang menghadapi permasa-

lahan dan isu-isu terkait korupsi, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, permasalahan tenaga kerja, suap dan belum maksimalnya pengelolaan potensi pajak.

Dengan mengetahui determinan *shadow economy* dan perbandingannya dengan *Brics Countries* Indonesia akan mendapatkan manfaat untuk meningkatkan performanya mendekati rata-rata *Brics Countries* dengan mengedepankan *control of corruption*, meningkatkan *government effectiveness*, memperbaiki regulasi terkait tenaga kerja (*labor market regulation*), membangun sistem pemerintahan dan merekrut aparat negara yang profesional dan berintegritas untuk menghindari adanya *extra payments/bribes/favoritism* yang akan menghambat masuknya investasi dan perputaran bisnis serta memaksimalkan potensi *tax revenue (% of GDP)* untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. SIMPULAN

Hasil analisis panel data dapat digunakan membuktikan hipotesis penelitian, sebagai berikut:

- a. Hipotesis bahwa performa pemerintahan di suatu negara akan berpengaruh secara signifikan pada besaran *shadow economy* hal ini terbukti dengan hasil pengujian independen variabel dari *worldwide governance indicators* baik indikator secara individual (*control of corruption* (COC), *government effectiveness* (GE), *credit market regulation* (CMR), *labor market regulation* (LMR), *bureaucracy costs* (BC), *extra payments/bribes/ favoritism* (EP), *business regulations* (BR), dan *tax revenue* (TR)) atau pun secara rata-rata (*average*) yang signifikan.
- b. Hipotesis regulasi/kebijakan terkait pasar kredit (*credit markets*), pasar tenaga kerja (*labor markets*), biaya birokrasi, *extra payments/bribes/favoritism* dan bisnis yang

dikeluarkan oleh pemerintah akan berpengaruh secara signifikan pada besaran *shadow economy* secara umum terbukti dari kesesuaian model ini yang relatif bagus.

- c. Hipotesis beban pajak (yang tercermin dari proxy penerimaan pajak) akan berpengaruh pada besaran *shadow economy* terbukti melalui pengujian t-test dari independen variabel *tax revenue* untuk ketiga model baik, *individual worldwide governance indicators*, *average worldwide governance indicators* dan *average government regulation* yang selalu memiliki pengaruh pada dependen variabel *shadow economy* pada baik pada signifikansi statistik 1%, 5% maupun 10%;

Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa keberadaan *shadow economy* beserta determinan pendukungnya yang bersifat terselubung (*hidden*) memiliki banyak sekali implikasi baik secara ekonomi, politik maupun sosial. Eksistensi *shadow economy* dalam suatu negara juga akan memiliki dampak tidak andalnya data indikator perekonomian utama seperti GDP yang akan berimbas pada kesalahan pengambilan kebijakan perekonomian secara keseluruhan.

Terbuktinya hipotesis bahwa beban pajak (yang tercermin dari proxy penerimaan pajak) akan berpengaruh pada besaran *shadow economy* memberikan penjelasan bahwa sektor fiskal merupakan sektor perekonomian yang paling utama terkena dampak dari keberadaan *shadow economy*. Dengan eksistensi *shadow economy* maka kebijakan fiskal menjadi tidak andal, karena semakin besar estimasi besaran *shadow economy* di suatu negara maka akan mengurangi potensi penerimaan pajak pemerintah, yang berimbas pada menurunnya kemampuan pemerintah untuk membiayai pengeluaran publiknya (*public expenditure*). Penurunan

kemampuan pemerintah ini akan menimbulkan defisit pada APBN yang pada akhirnya akan memicu disepakatinya hutang pemerintah (*debt*) untuk pembiayaan defisit.

5. REFERENSI

- Ahmed, Mehnaz and Qazi Masood Ahmed, 1995. "Estimation of the Black Economy of Pakistan through the Monetary Approach," *The Pakistan Development Review*, Pakistan Institute of Development Economics, vol. 34(4), pages 791-807.
- Bajada, Christopher and Friedrich Schneider., 2005. The shadow economies of the Asia-Pacific, *Pacific Economic Review* 10, 379-401.
- Cicek, D., Elgin, C., 2011. Cyclicalities of fiscal policy and the shadow economy, *Empirical Economics*, 413, pages 725-737.
- D'Erasmus, P. N., Moscoso Boedo, H. J. 2012. Financial Structure, Informality and Development, *Journal of Monetary Economics*, forthcoming.
- Dell' Anno, Roberto., 2007. The shadow economy in Portugal: An analysis with the MIMIC approach, *Journal of Applied Economics* 10: 253-277.
- De Soto, H., 1989. *The other path: The invisible revolution in the third world*, New York, Harper Collins
- Dreher, A., and Schneider, F., 2010. Corruption and the shadow economy: An empirical analysis, *Public Choice*, 144, 215-238.
- Elgin, Ceyhun and Oguz Oztunali., 2012. Shadow Economies around the World: Model Based Estimates, Working Papers 2012/05, Bogazici University.
- Feige, Edgar L., 1990. "Defining and estimating underground and informal economies: The new institutional economics approach," *World Development*, Elsevier, vol. 18(7), pages 989-1002, July.
- Friedman, E., Johnson, S., Kaufman, D., Zoldo-Lobaton, P., 2000. Dodging the Grabbing Hand: The Determinants of Unofficial Activity in 69 Countries, *Journal of Public Economics* 76 3: 459-493.
- Gujarati, Domar N., 2004, *Basic Econometrics*, 4th edition, pp. 636-662, McGraw- Hill, USA.
- Ihrig, J., Moe, K., 2004. Lurking in the shadows: The informal sector and government policy. *Journal of Development Economics*, 73, 541-77.
- Manolas, George, Kostas Rontos, George Sfakianakis and Ioannis Vavouras., 2013. The Determinant of the Shadow Economy: The Case of Greece, *International Journal of Criminology and Sociology*, Vol. 6, No. 1, 1036-1047.
- Schneider F., Enste, D. H., 2000. Shadow Economies: Sizes, Causes and Consequences. *Journal of Economic Perspectives*, 38: 77-114.
- Schneider, F., 2005. Shadow Economies Around the World: What do We Really Know?, *European Journal of Political Economy*, 21, 598-642.
- Tanzi, V., 1983 The underground economy in the United States: annual estimates, 1930-80, *IMF Staff Papers*, 30 (2), 283-305.